

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aminuddin Salle dan kawan-kawan, 2006, *Bahan Ajar Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar,
- A.P Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2008,.H M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Pustaka Yogyakarta: Yogyakarta, 2003.
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Tama : Jakarta, 2002.
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria* ( Graha Ilmu,Jogjakarta 2011).
- Soebekti dan R tjitrosoedibio, *kamus hokum* ( pradya paramita, Jakarta, 1983)
- Soegijanto P Supriadi, *Hukum Agraria*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tampil Anshari Siregar, *Memperlakukan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik Medan, Medan, 2005.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hal.55

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

**Jurnal :**

A. Joni Minulyo. (2007). *ASAS-ASAS HUKUM REFORMASI AGRARIA. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 Nomor 4.*

Agus Gunawan. 2015. “Upaya Pemda Dalam Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Pembangunan Pltu (Studi Kasus Di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)”. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dan perspektif*, Bandung, (Remaja Karya CV, 1988)

Boris, O., & Butar Butar, H. (2017). *EFEKTIFITAS KETENTUAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN SEMARANG SKRIPSI Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.* Sucianti, N. (2004). *LAND REFORM INDONESIA. In Nadya Sucianti-Land reform Indonesia Lex Journalica (Vol. 1, Issue 3).*

Handoko Probo Setiawan, “Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian ke Non Pertanian Kasus di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota

Samarinda”, *Ejurnal SosiatriSosiologi*, Volume 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2016.

Ketut Dezy Ari Utami.” Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005)”. *Diponegoro Law Review*. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2014.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya :Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo. Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000.

**Website :**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895>

<https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2018/11/04/421/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-jombang-ha-2015-2017.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Distribusi Tanah dan Kompensasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 tentang Hibah Tanah Pertanian secara Guntai (*Absentee*) Bagi Pensiunan PNS. Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Heru Budi Mulyono S.E. selaku Kepala Dusun Desa Gajah, bertempat di Kantor Desa dan rumah Kepala Dusun.

Wawancara dengan Bapak Widodo selaku staff Kantor Desa Gajah, bertempat di Kantor Desa Gajah, pukul 09.00 WIB Pada tanggal 21 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Witono S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum dan Pertanahan di Kabupaten Jombang, pukul 10.00 WIB, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak H. Sul Khan selaku pemilik tanah *Absentee* di Desa Gajah, pada tanggal 08 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Kepala Desa Gajah, bertempat di Kantor Desa Gajah dan rumah Kepala Desa , Pada tanggal 3 Januari 2022.